



Memikirkan Ulang Sejarah Ekspansi Kolonial Belanda ke Sumatera Timur

Rethinking the History of Dutch Colonial Expansion into East Sumatra

Devi Itawan*, Universitas Jambi, Indonesia

Bahagio Raharjo, Universitas Diponegoro, Indonesia

ABSTRACT

This article reexamines the history of Dutch colonial expansion on the East Coast of Sumatra by situating it within a broader framework of imperialism, global capitalism, knowledge production, and ecological transformation. It asks how colonial expansion in the region can be understood beyond a purely territorial and political process. Using historical methods based on primary sources such as colonial reports, expedition accounts, and contemporary newspapers, the study analyzes the interplay between state power and private capital. The findings show that the rapid colonization of East Sumatra was driven less by direct state intervention than by foreign investment in plantation industries, particularly tobacco, supported by policies such as the Agrarian Law of 1870. Moreover, colonial knowledge and ecological restructuring played crucial roles in legitimizing and enabling exploitation. The article argues that colonial expansion in East Sumatra was a multidimensional process integrating political domination, capitalist penetration, and environmental transformation.

ARTICLE HISTORY

Received 09/06/2026

Revised 26/07/2026

Accepted 08/08/2026

Published 15/08/2026

KEYWORDS

Colonial knowledge; Dutch colonial expansion; East Sumatra; environmental transformation; private capital.

*CORRESPONDING AUTHOR

✉ devi.itawan@unja.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v10i2.13795>

PENDAHULUAN

Dalam sejarah ekspansi kolonial Belanda ke wilayah luar Jawa sejak 1870-an, kolonisasi Sumatera Timur memiliki kedudukan penting karena keberhasilannya menjadi inspirasi bagi berbagai upaya kolonisasi di wilayah perbatasan (*frontier*) lainnya. Keberhasilan para pengusaha perkebunan dalam mengubah kawasan hutan menjadi perkebunan komoditas tropis dan kota-kota kolonial modern mendorong pengusaha swasta asing untuk membuka lahan di berbagai wilayah luar Jawa (Lindblad, 1989). Nilai historis kolonisasi Sumatera Timur tidak hanya terletak pada keberhasilannya sebagai model ekspansi kolonial, tetapi juga pada keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi kolonial yang lebih luas. Kolonisasi tersebut menjadi bagian penting dari perluasan kapitalisme global di Hindia Belanda sejak 1870-an (Thee, 1969). Perkembangan ini memperlihatkan bahwa ekspansi kolonial di Sumatera Timur melibatkan hubungan antara kepentingan politik negara kolonial dan pertumbuhan investasi kapital swasta.

Kompleksitas kolonisasi Sumatera Timur terlihat dari keterlibatan berbagai faktor yang mendorong proses penaklukannya. Pada tahap awal, pemerintah kolonial menggerakkan ekspansi melalui perluasan kekuasaan teritorial sejak pertengahan abad ke-19, sedangkan investasi modal asing kemudian mempercepat proses kolonisasi tersebut (Ramadhan & Achiriah, 2026). Pemerintah kolonial turut mendukung perkembangan investasi melalui pemberlakuan *Agrarische Wet* 1870 yang memberikan jaminan hukum bagi pengusaha swasta asing untuk memperoleh akses terhadap faktor produksi industri ekstraktif. Perluasan investasi tersebut juga mendorong penggunaan instrumen kolonial lainnya, terutama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan penaklukan ekologis untuk mendukung penguasaan wilayah (Itawan, 2020, 2022). Hubungan antara kekuasaan negara, kepentingan kapital, produksi pengetahuan, dan perubahan lingkungan menunjukkan bahwa kolonisasi Sumatera Timur tidak dapat dipahami hanya sebagai proses perluasan wilayah politik (Utari, 2023).

Kajian mengenai kolonisasi Sumatera Timur telah banyak membahas pertumbuhan ekonomi (Thee, [1969](#)), persoalan perburuan (Bremen, [1997](#); Stoler, [2005](#)), serta masalah agraria (Ikhsan, [2021](#); Pelzer, [1985](#)). Berbagai persoalan tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan politik dan ekonomi Sumatera Timur yang pengaruhnya masih dapat ditemukan hingga sekarang. Dalam konteks kolonial, ekspansi kapital berlangsung melalui kerangka imperialisme Belanda yang memungkinkan perluasan kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi ke wilayah luar Jawa (Locher-Scholten, [1994](#)). Meskipun kajian terdahulu telah menjelaskan berbagai konsekuensi ekonomi dan sosial kolonisasi, hubungan antara ekspansi kapital, produksi pengetahuan kolonial, dan transformasi lingkungan belum memperoleh perhatian yang seimbang. Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap proses politik kolonial dengan menempatkan berbagai instrumen ekspansi dalam satu kerangka analisis yang saling berkaitan.

Kajian sejarah ekspansi kolonial di Sumatera Timur selama ini cenderung menekankan perluasan teritorial negara kolonial Hindia Belanda dengan menempatkan konfrontasi antara pemerintah kolonial dan elite lokal sebagai pusat narasi (Ayu, [2021](#); Basarshah, [2006](#)). Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan keterkaitan antara imperialisme Belanda, ekspansi kapital, pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan paradigma kolonial terhadap alam dalam proses penaklukan wilayah. Permasalahan utama penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya dimensi politik, ekonomi, pengetahuan kolonial, dan lingkungan dalam penjelasan historis mengenai ekspansi kolonial Belanda di Sumatera Timur. Penelitian ini menggunakan perspektif imperialisme dan kapitalisme kolonial sebagai kerangka analitis untuk memahami hubungan antara kekuasaan negara dan investasi swasta, dengan menempatkan produksi pengetahuan kolonial serta transformasi ekologis sebagai instrumen yang mendukung penguasaan wilayah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mempertanyakan bagaimana hubungan antara kekuasaan kolonial, investasi kapital swasta, produksi pengetahuan, dan transformasi lingkungan membentuk proses ekspansi kolonial Belanda di Sumatera Timur. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan pembacaan alternatif terhadap sejarah ekspansi kolonial Sumatera Timur sebagai proses multidimensional yang melibatkan dominasi politik, penetrasi kapitalisme, dan penaklukan ekologis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengkaji kompleksitas kolonisasi di Sumatera Timur dengan menempatkan kolonisasi tidak hanya sebagai proses penundukan politik, tetapi juga sebagai bagian dari penetrasi kapitalisme melalui ekspansi industri ekstraktif. Penelitian ini menggunakan sumber primer berupa tulisan pejabat kolonial, laporan ekspedisi, dan artikel surat kabar yang menggambarkan pandangan kolonial terhadap potensi sumber daya alam Sumatera Timur. Sumber tersebut mencakup laporan Anderson, utusan Inggris yang melakukan ekspedisi ke Sumatera Timur pada 1823, melalui *Mission to the East Coast of Sumatra* (Anderson, [1971](#)). Penelitian ini juga menggunakan laporan Netscher, Residen Riau yang melakukan ekspedisi pada 1860, melalui *Togtjes in het gebied van Riouw en onderhoorigheden* (Netscher, [1861](#)), serta tulisan Gramberg yang berkaitan dengan kegiatan *Natuurkundig Genotschap en Watenschappen* (Gramberg, [1864](#)).

Penelitian ini melengkapi sumber primer dengan artikel surat kabar kolonial, seperti *Indische Mercur*, *De Telegraaf*, dan *De Sumatra Post*, yang memuat informasi mengenai perkembangan kolonisasi Sumatera Timur. Peneliti juga menggunakan sumber sekunder untuk memahami perkembangan politik kolonial dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Sumber tersebut meliputi karya Blink, *Opkomst en ontwikkeling van Sumatra als economisch-geographisch gebied* (Blink, [1926](#)), Broesma, *Oostkust van Sumatra: De Ontluiking van Deli* (Broersma, [1919](#)), dan Schade, *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust* (Schadé, [1919](#)). Berbagai sumber tersebut menjadi dasar untuk

menelusuri hubungan antara ekspansi kekuasaan kolonial, investasi kapital swasta, dan perubahan lingkungan di Sumatera Timur.

Penelitian ini menerapkan kritik sumber sejarah dengan mempertimbangkan latar belakang penulis, tujuan penyusunan dokumen, serta kepentingan politik dan ekonomi yang memengaruhi narasi kolonial. Peneliti membaca laporan ekspedisi, tulisan pejabat, dan surat kabar secara kritis untuk mengidentifikasi bias dalam penggambaran masyarakat lokal, sumber daya alam, dan legitimasi penguasaan wilayah. Peneliti kemudian membandingkan informasi antar sumber untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kecenderungan narasi mengenai proses kolonisasi. Peneliti melakukan interpretasi historis dengan menempatkan pengetahuan kolonial bukan hanya sebagai catatan faktual, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung kepentingan ekspansi kolonial. Analisis tersebut menjelaskan keterkaitan antara kekuasaan politik, penetrasi kapitalisme, produksi pengetahuan kolonial, dan transformasi ekologis di Sumatera Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Wilayah Kolonial dan Karakteristik Geografis-Ekologis Sumatera Timur

Secara geografis, Sumatera Timur merujuk pada wilayah pesisir timur Pulau Sumatera yang mencakup sebagian kawasan Aceh, Palembang, Lampung, dan wilayah timur lainnya. Dalam konteks ekspansi kolonial Belanda, istilah Sumatera Timur memiliki pengertian yang lebih khusus sebagai konstruksi regional dan administratif kolonial yang membentang dari perbatasan Tamiang di utara hingga Indragiri-Riau di selatan, serta berbatasan dengan Tapanuli dan Sumatera Barat di sebelah barat. Para pengusaha swasta asing lebih mengenal wilayah ini dengan sebutan Deli karena industri perkebunan tembakau pertama kali berkembang di kawasan tersebut. Wilayah Langkat, Deli, dan Serdang kemudian memperoleh sebutan *cultuurgebied* atau kawasan perkebunan yang mencerminkan karakteristik geografis, ekonomi, dan ekologis Sumatera Timur pada masa kolonial. Pemerintah kolonial secara resmi menggunakan nama *Residentie Oostkust van Sumatra* sejak 1873 dan mengubah status administratifnya menjadi *Gouvernement van Oostkust van Sumatra* pada 1915 (De Buitenzettingen Oostkust van Sumatra, 1918).

Secara astronomis, Sumatera Timur terletak antara 0°30'–4° Lintang Utara dan 97°30'–103°30' Bujur Timur. Kondisi topografinya mencakup kawasan pegunungan yang berbatasan dengan sisi timur Bukit Barisan serta dataran rendah dan pesisir yang memiliki banyak sungai dangkal dan rawa. Kawasan pegunungan di bagian utara, terutama Langkat, Deli, dan Serdang, memiliki jarak yang lebih dekat dengan pantai dibandingkan wilayah Asahan dan Bengkalis. Rangkaian pegunungan dan dataran tinggi tersebut meliputi Pegunungan Wilhemina atau Gunung Bendahara (3.030 m), Missigit (1.850 m), Peperkison (2.710 m), Toesam, Palpalan (1.850 m), Similir (1.754 m), Penatapan (1.810 m), Sibajak (2.112 m), dan Baroes (1.965 m). Pegunungan dengan ketinggian sekitar 1.800 meter berada pada jarak 30–60 km dari pantai, sedangkan pegunungan berketinggian sekitar 1.600 meter terletak pada jarak 20–50 km dari pantai (Van Zon, 1916). Karakteristik geografis tersebut membentuk kondisi iklim dan geologis yang mendukung kegiatan pertanian, terutama pengembangan perkebunan tembakau Deli.

Sebagian besar lereng pegunungan di Sumatera Timur mengarah ke timur sehingga aliran sungainya bergerak menuju kawasan pesisir dan bermuara di Selat Malaka. Sebagian kecil aliran sungai, seperti Lau Alas yang merupakan bagian dari sistem aliran Simpang Kiri, mengarah ke Samudra Hindia. Sungai-sungai yang berhulu di kawasan pegunungan mengalir melalui lereng menuju dataran rendah aluvial dengan panjang lintasan sekitar 50 km, sedangkan di wilayah Asahan mencapai sekitar 180 km (Tijdschrift Voor Economische Geographie, 1918). Sebagian besar sungai tersebut memiliki karakteristik dangkal dan mengalami proses erosi serta pengendapan yang

berlangsung secara alami. Proses tersebut berperan penting dalam pembentukan dataran aluvial yang memiliki tingkat kesuburan tinggi dan mendukung perkembangan pertanian di kawasan dataran rendah.

Aliran sungai juga membawa material vulkanis dari kawasan dataran tinggi menuju dataran rendah sehingga memengaruhi pembentukan dan karakteristik tanah di Sumatera Timur. Sungai-sungai utama, seperti Lau Bilang, Lau Bengap, Wampu, Asahan, Panai, dan Rokan, mengalir melewati kawasan lipatan Barisan Timur serta perbukitan tersier di kaki Bukit Barisan. Kawasan tersebut memiliki kandungan material geologis berupa andesit, tufa, dan batuan liparit yang berkontribusi terhadap pembentukan tanah di sepanjang daerah aliran sungai. Perpindahan dan pengendapan material tersebut menghasilkan kawasan pertanian yang subur, terutama pada wilayah yang membentang antara Asahan dan Langkat (Tijdschrift Voor Economische Geographie, [1918](#)). Kondisi ini memperlihatkan hubungan antara sistem aliran sungai, proses geologis, dan potensi agraris yang kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan industri perkebunan kolonial.

Wilayah pesisir Sumatera Timur memiliki karakteristik rawa dan lumpur sebagaimana kawasan pesisir timur Pulau Sumatera pada umumnya. Dataran rendah di wilayah ini terbentuk melalui proses sedimentasi aluvial yang membawa material lumpur dari kawasan pedalaman menuju muara sungai. Endapan tersebut secara bertahap membentuk perluasan daratan dan kawasan rawa di sepanjang pesisir (Anderson, [1971](#)). Penelitian geologi kolonial mengidentifikasi bahwa tanah di Deli memiliki tingkat kesuburan yang tinggi untuk pengembangan tembakau dan berbagai tanaman lainnya karena berkaitan dengan aktivitas vulkanis Toba pada masa lampau. Van Bemmelen ([1949](#)) menghubungkan karakteristik geologis tersebut dengan fenomena yang mereka sebut *batak-boog* atau tumor Batak.

Aktivitas vulkanis pada masa lampau membentuk lapisan tanah yang mengandung material liparit, dasit, dan abu hitam dengan tingkat keasaman, warna, serta karakteristik yang berbeda. Perbedaan komposisi material tersebut memengaruhi tingkat kesuburan tanah dan kesesuaiannya bagi pengembangan tanaman perkebunan. Tanah debu hitam merupakan salah satu jenis tanah yang dianggap paling baik untuk pertanian di Sumatera Timur. Sebaran tanah tersebut dilaporkan membentang sepanjang 275 km² dengan luas sekitar 150 km² di antara Sungai Wampu dan Sungai Deli (Pelzer, [1985](#); Van Bemmelen, [1949](#)). Kondisi geologis ini menjadi salah satu faktor ekologis yang mendukung perkembangan kawasan Deli sebagai pusat produksi tembakau pada masa kolonial.

Garis pantai Sumatera Timur pada umumnya memiliki perairan dangkal, ceruk, serta kawasan berlumpur yang terbentuk melalui pengendapan material dari aliran sungai. Vegetasi alami di kawasan pesisir didominasi hutan mangrove, terutama kelompok *Rhizophora* yang dikenal masyarakat Melayu sebagai bakau, sedangkan kawasan pantai berpasir juga ditumbuhi cemara laut. Sebelum ekspansi perkebunan, kawasan rawa dan dataran rendah masih ditutupi hutan dengan pepohonan berukuran besar yang membatasi akses menuju wilayah pedalaman. Kondisi rawa, lumpur, dan vegetasi yang rapat menyebabkan sebagian kawasan pesisir sulit dijangkau serta menghadirkan tantangan bagi perkembangan pertanian dan permukiman (Tijdschrift Voor Economische Geographie, [1918](#)). Karakteristik lingkungan tersebut menunjukkan bahwa kesuburan tanah aluvial tidak secara langsung menjadikan seluruh kawasan pesisir mudah dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.

Kondisi geografis dan ekologis tersebut turut membentuk Sumatera Timur sebagai wilayah perbatasan ekspansi (*frontier*) dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah (Colombijn, [1998](#)). Masyarakat umumnya membangun permukiman di sepanjang aliran sungai yang terletak agak jauh dari garis pantai karena kawasan tersebut menyediakan akses transportasi dan ruang hunian yang lebih memungkinkan. Di wilayah *cultuurgebied*, permukiman pesisir umumnya berupa kampung nelayan yang dikenal dengan sebutan *bagan*, yang berkembang di sekitar pantai atau agak ke

pedalaman mengikuti aliran sungai (Blink, [1926](#)). Pola permukiman tersebut memperlihatkan hubungan antara kondisi lingkungan, jaringan sungai, dan aktivitas ekonomi masyarakat sebelum perluasan industri perkebunan kolonial. Karakteristik wilayah ini sekaligus memberikan konteks geografis bagi pemahaman mengenai bagaimana ekspansi kapitalisme perkebunan kemudian mengubah penggunaan lahan dan struktur ruang di Sumatera Timur.

Jaringan Perdagangan, Ekonomi Lokal, dan Dinamika Agraria Sumatera Timur Pra-Kolonial

Sebelum ekspansi kolonial Belanda, Sumatera Timur bukan merupakan wilayah kosong atau kawasan tanpa potensi ekonomi sebagaimana kerap digambarkan oleh pemerintah kolonial dan para pengusaha perkebunan. Meskipun memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah, kawasan pesisir Sumatera Timur telah mengembangkan aktivitas ekonomi yang terhubung dengan jaringan perdagangan di Selat Malaka dan kemudian dengan pusat-pusat perdagangan di *Straits Settlements*. Masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam melalui berbagai kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perburuan, dan pengumpulan hasil hutan. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Sumatera Timur telah memiliki sistem produksi dan pertukaran ekonomi sebelum kedatangan industri perkebunan kolonial. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa ekspansi kolonial Belanda berlangsung di atas struktur ekonomi lokal yang telah terbentuk sebelumnya.

Temuan arkeologis di Pulau Kampai dan kawasan Kota Cina menunjukkan keterlibatan Sumatera Timur dalam jaringan perdagangan internasional sejak abad ke-10 hingga abad ke-15. Ekskavasi di kedua situs tersebut menghasilkan temuan berupa mata uang dari masa Dinasti Tang, Song Selatan, hingga Ming, pecahan keramik Tiongkok, tembikar dari Sri Lanka dan India, arca Buddha dan Siwa, serta pecahan kaca dari Timur Tengah. Berbagai artefak tersebut memperlihatkan hubungan perdagangan yang menghubungkan Pulau Kampai di Teluk Aru, Langkat, dan Kota Cina di Belawan, Deli, dengan kawasan Tiongkok, India, Sri Lanka, dan Timur Tengah. Perret dan Sinar menjelaskan bahwa perkembangan bandar-bandar di pesisir utara Sumatera Timur tidak hanya didukung oleh posisi strategisnya di jalur pelayaran Selat Malaka, tetapi juga oleh kegiatan pengumpulan dan perdagangan hasil hutan dari pedalaman. Komoditas yang diperdagangkan mencakup kapur barus, kemenyan (*benzoin*), emas, rotan, budak, dan binatang (Basarshah, [2006](#); Milner et al., [1978](#); Pelzer, [1985](#)).

Memasuki abad ke-18, kegiatan ekonomi Sumatera Timur mengalami perkembangan melalui peningkatan produksi pertanian yang berorientasi ekspor, terutama komoditas lada. Para pedagang Inggris di kawasan *Straits Settlements* mengenal pelabuhan-pelabuhan Sumatera Timur sebagai pusat perdagangan lada, meskipun sumber sejarah belum memberikan kepastian mengenai awal kemunculan pertanian komoditas tersebut. Catatan yang tersedia juga belum menunjukkan keberadaan perkebunan lada di Sumatera Timur sebelum abad ke-18. Perret menghubungkan perkembangan pertanian lada dengan perluasan pengaruh politik Aceh yang turut mendorong komoditas tersebut menjadi bagian penting dalam perekonomian wilayah ini (Perret, [1994](#)). Di Langkat, masyarakat mulai mengembangkan tanaman lada sekitar peralihan abad ke-18, sedangkan di Asahan penanamannya baru dimulai ketika Anderson melakukan ekspedisi ke wilayah tersebut (Pelzer, [1985](#)).

Pelzer menjelaskan bahwa masyarakat lokal Sumatera Timur mengembangkan kegiatan pertanian melalui sistem perladangan berpindah dengan memanfaatkan kawasan hutan dan lahan di sepanjang aliran sungai. Masyarakat membuka sebagian kawasan hutan untuk kegiatan pertanian sementara, kemudian memanfaatkan lahan bekas penanaman padi sebagai tempat penanaman lada. Setelah masa panen, para peladang membiarkan lahan tersebut mengalami pertumbuhan vegetasi alami hingga kembali ditumbuhi semak belukar. Beberapa tahun kemudian, masyarakat memanfaatkan kembali lahan yang sama untuk menanam jagung, sayuran, dan umbi-umbian (Pelzer, [1985](#)). Pola pertanian

tersebut menunjukkan adanya sistem pemanfaatan lahan secara bergilir yang menjadi bagian dari praktik agraria masyarakat Sumatera Timur sebelum berkembangnya perkebunan kolonial.

Catatan perjalanan Anderson memperlihatkan bahwa Sumatera Timur menghasilkan berbagai komoditas pertanian dan hasil hutan yang diperdagangkan ke pusat-pusat perdagangan di *Straits Settlements*. Pada awal abad ke-19, lada menjadi salah satu komoditas ekspor utama dengan jumlah pengiriman ke Penang pada 1822 mencapai 20.000 pikul dari Langkat, sekitar 15.600 pikul dari Bulu Cina, dan 26.000 pikul dari Deli (Anderson, 1971). Perret menjelaskan bahwa peningkatan produksi lada berkaitan dengan semakin intensifnya penggunaan peralatan pertanian berbahan besi yang didatangkan dari *Straits Settlements*. Perkembangan tersebut juga disertai upaya pelembagaan kegiatan pertanian melalui institusi adat atau *urung* yang berperan dalam memobilisasi dan mengendalikan penanaman lada di Sumatera Timur (Pelzer, 1985). Hubungan antara perdagangan, penggunaan teknologi pertanian, dan keterlibatan lembaga adat memperlihatkan perkembangan organisasi ekonomi lokal sebelum masuknya industri perkebunan Barat.

Keterlibatan elite adat Melayu dan Batak Karo dalam pengembangan pertanian lada memperlihatkan hubungan ekonomi antara masyarakat pedalaman dan pesisir yang terus terpelihara. Para kepala suku Batak Karo menjalin kerja sama dengan elite Melayu untuk memperluas kegiatan pertanian ke dataran rendah Sumatera Timur melalui penyediaan peralatan seperti cangkul, sekop, parang, dan keranjang yang diperoleh dari *Straits Settlements*. Elite Melayu juga menjanjikan dukungan logistik berupa beras dan garam serta pembayaran upah menggunakan dolar Spanyol (Perret, 1994). Anderson mencatat bahwa perkembangan pertanian lada mendorong perpindahan masyarakat pedalaman menuju kawasan hilir untuk membuka dan mengelola lahan pertanian. Mobilitas tersebut meningkatkan keberadaan masyarakat Batak Karo di dataran rendah sekaligus memperluas persebaran pertanian lada dari kawasan pegunungan menuju wilayah pesisir Sumatera Timur.

Perkembangan pertanian lada juga membentuk perubahan dalam persebaran permukiman dan pemanfaatan lahan di Sumatera Timur. Melalui penelusuran toponimi, Perret memetakan persebaran perkebunan lada dan kegiatan pertanian lainnya yang menunjukkan hubungan antara mobilitas penduduk dan perluasan kawasan produksi. Pertanian lada mencapai masa perkembangan tertingginya pada periode 1853–1859 (Perret, 1994). Persaingan dan konflik antara Inggris dan Belanda di kawasan Selat Malaka turut meningkatkan permintaan terhadap lada yang diproduksi di Sumatera Timur. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan pertanian lokal tidak terlepas dari dinamika perdagangan dan persaingan kekuatan Eropa di kawasan Selat Malaka.

Memasuki dekade 1860-an, pertanian lada di Sumatera Timur mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama masyarakat. Netscher, yang mengunjungi Sumatera Timur pada 1861, menghubungkan penyusutan luas perkebunan lada dengan konflik berkepanjangan antarkepala suku yang mengganggu kegiatan pertanian (Netscher, 1861). Perubahan semakin terlihat ketika industri perkebunan Barat mulai berkembang dan memperluas penguasaan lahan di kawasan tersebut. Ekspansi perkebunan kolonial secara bertahap memarginalkan pertanian lada hingga komoditas tersebut hampir menghilang dari sebagian wilayah Sumatera Timur.

Ekspansi Kekuasaan Kolonial Belanda: Penetrasi Kapitalisme, Produksi Pengetahuan, dan Transformasi Ekologis di Sumatera Timur

Keberhasilan ekspansi kolonial Belanda di Sumatera Timur merupakan hasil dari proses penaklukan politik, ekonomi, dan ekologis yang berlangsung secara bersamaan dan saling berkaitan. Keterlibatan berbagai kepentingan dalam proses tersebut bahkan memunculkan perdebatan antara pengusaha

perkebunan dan pemerintah kolonial mengenai pihak yang paling berperan dalam menciptakan apa yang mereka sebut sebagai “kemajuan” Sumatera Timur (“De Deliaan Gaan Feestvieren,” 1938). Perubahan wilayah dalam waktu relatif singkat menjadi sumber kebanggaan bagi kalangan kolonialis dan kapitalis yang terlibat dalam pengembangan industri perkebunan. De Steur sebelumnya menilai bahwa Sumatera Timur tidak akan memberikan keuntungan yang sebanding dengan biaya penyelenggaraan pemerintahan karena jumlah penduduknya sedikit serta sebagian besar wilayahnya masih tertutup hutan dan rawa (Pelzer, 1985; Schadé, 1919). Perkembangan selanjutnya justru memperlihatkan bahwa wilayah tersebut mampu tumbuh menjadi pusat ekonomi kolonial baru yang memiliki arti penting dan bahkan dipandang mampu menyaingi Jawa.

Sumatera Timur berkembang menjadi salah satu wilayah koloni yang paling bernilai secara ekonomi bagi pemerintah Hindia Belanda hingga menjelang berakhirnya kekuasaan kolonial. Industri perkebunan tembakau yang dirintis Jacobus Nienhuys sejak 1863 menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar. Pada 1901, produksi tembakau Sumatera Timur mencapai 227.512 bal dengan nilai sekitar 32.550.000 gulden, sedangkan pada periode berikutnya nilai produksi yang dilaporkan mencapai hampir 700 juta gulden. Nilai tersebut belum mencakup kontribusi komoditas perkebunan lain yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-19, seperti karet, teh, kopi, dan kelapa sawit (“Een En Ander over Deli,” 1904). Perkembangan ini menunjukkan bahwa ekspansi kapitalisme perkebunan mengubah kedudukan Sumatera Timur dari wilayah yang sebelumnya dianggap kurang menguntungkan menjadi salah satu pusat produksi komoditas ekspor kolonial.

Perkembangan industri perkebunan turut mengubah bentang alam Sumatera Timur yang sebelumnya didominasi hutan tropis dengan pepohonan besar, kawasan rawa, dan vegetasi alami. Para pengusaha perkebunan mengubah kawasan tersebut menjadi hamparan tanaman monokultur yang dilengkapi jaringan kereta api, jalan raya, perkantoran, hotel, permukiman, dan pusat-pusat perkotaan. Mereka mengklaim bahwa perubahan tersebut merupakan hasil kerja keras pengusaha swasta dalam membuka hutan dan membangun infrastruktur, sedangkan pemerintah kolonial baru memperluas keterlibatannya setelah kegiatan perkebunan menunjukkan perkembangan ekonomi. Kalangan pengusaha perkebunan Deli yang menyebut diri sebagai *Deliaan* memandang keberhasilan tersebut sebagai pencapaian dalam membangun pusat peradaban kolonial di tengah kawasan yang sebelumnya mereka gambarkan sebagai hutan belantara. Mereka menempatkan pembangunan infrastruktur dan perubahan lingkungan sebagai bagian dari upaya menjadikan Deli lebih layak huni atau *habitable* bagi kepentingan industri perkebunan (“De Deliaan Gaan Feestvieren,” 1938).

Kompleksitas kolonisasi Sumatera Timur tidak dapat dipisahkan dari persaingan ekonomi Inggris dan Belanda di Selat Malaka, kepentingan perluasan kekuasaan kolonial, pemanfaatan ilmu pengetahuan, serta perkembangan kapitalisme internasional. Agenda ekspansi teritorial Belanda ke wilayah luar Jawa mulai memperoleh perhatian serius pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Pemerintah kolonial merumuskan rencana perluasan wilayah pada periode 1830–1833 dengan perkiraan pelaksanaan selama 25 tahun. Kebutuhan finansial pemerintah Belanda setelah Perang Jawa dan konflik dengan Belgia mendorong upaya penguasaan wilayah baru yang memiliki potensi ekonomi untuk dieksploitasi sebagaimana Pulau Jawa melalui sistem tanam paksa. Pemerintah kolonial menjalankan ekspansi tersebut secara bertahap karena penguasaan wilayah luar Jawa, termasuk Bangka, Banda, dan Sumatera, membutuhkan pertimbangan politik, ekonomi, serta kemampuan administratif yang memadai (Schadé, 1919).

Blink membagi perkembangan ekspansi kolonial dan eksploitasi ekonomi di Sumatera ke dalam dua periode utama. Periode pertama berlangsung antara 1824 dan 1870 yang ditandai oleh perluasan wilayah serta penguatan otoritas politik pemerintah kolonial Belanda. Periode kedua berlangsung sejak 1870 dan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi Sumatera melalui perkembangan industri

perkebunan yang semakin intensif (Blink, [1926](#)). Pembagian tersebut memperlihatkan pergeseran orientasi ekspansi kolonial dari penguasaan teritorial menuju pemanfaatan sumber daya ekonomi secara lebih luas. Kedua periode tersebut juga menunjukkan bahwa pembentukan kekuasaan kolonial dan perkembangan kapitalisme perkebunan merupakan proses yang saling berkaitan dalam sejarah Sumatera Timur.

Pemerintah kolonial Belanda menjalankan rencana perluasan wilayah secara hati-hati dengan mempertimbangkan persaingan perdagangan dengan Inggris di Selat Malaka, keterbatasan anggaran, serta jumlah pejabat pemerintahan yang tersedia (Schadé, [1919](#)). Pertimbangan tersebut menyebabkan wilayah Deli, Serdang, Langkat, dan Asahan pada awalnya tidak menjadi prioritas penguasaan pemerintah kolonial. Pemerintah memandang kawasan perbatasan ekspansi (*frontier*) tersebut membutuhkan biaya administratif yang besar, sementara pengaruh perdagangan Inggris masih cukup kuat. Persaingan kedua kekuatan Eropa itu berakar pada perbedaan kepentingan perdagangan yang telah berlangsung sejak masa VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda. Sistem monopoli dan pembatasan perdagangan yang diterapkan Belanda sering kali menghambat akses pedagang Inggris ke wilayah yang berada di bawah pengaruhnya (Pelzer, [1985](#); Tarling, [1958](#)).

Tarling menjelaskan bahwa kembalinya kekuasaan Belanda di Malaka dan pendirian Singapura oleh Raffles meningkatkan ketertarikan para pedagang Penang terhadap kawasan Sumatera Timur (Anderson, [1971](#)). Perkembangan tersebut memperkuat hubungan perdagangan antara masyarakat lokal Sumatera Timur dan pusat-pusat perdagangan Inggris di Selat Malaka yang kemudian tergabung dalam *Straits Settlements*. Sumatera Timur memasok berbagai komoditas penting, seperti lada, gambir, tembakau, dan hasil hutan, sedangkan pedagang Inggris menyediakan barang manufaktur berupa tekstil, peralatan besi untuk pertanian dan peperangan, garam dari Siam, serta opium (Netscher, [1861](#)). Hubungan perdagangan tersebut menempatkan Sumatera Timur sebagai salah satu mitra ekonomi penting bagi pedagang Inggris di kawasan Selat Malaka. Kedudukan ini tetap bertahan meskipun industri perkebunan kolonial mulai berkembang dan memperluas hubungan ekonomi wilayah tersebut dengan pasar internasional.

Ketika Inggris memperkuat hubungan perdagangan dengan Sumatera Timur, pemerintah kolonial Belanda memperluas pengaruhnya melalui kawasan barat Sumatera, terutama Angkola, Barumon, dan Padang Lawas, sebelum bergerak menuju Kota Pinang, Panai, Bila, Dalu-Dalu, dan Indragiri. Pergerakan tersebut berkaitan dengan perkembangan Perang Padri yang mendorong keterlibatan militer Belanda di berbagai wilayah Sumatera. Pemerintah kolonial sempat mendirikan sejumlah pos militer di kawasan timur, tetapi Menteri Jajahan Baud memerintahkan penarikan pasukan dari wilayah tersebut pada 1840. Kebijakan tersebut mencerminkan politik menahan diri yang mempertimbangkan Traktat London serta kemungkinan munculnya keberatan dari pedagang Inggris di *Straits Settlements*. Pemerintah kolonial juga lebih mengutamakan pengembangan pelabuhan di pantai barat Sumatera untuk mengurangi ketergantungan terhadap jaringan perdagangan yang dipengaruhi Inggris (Pelzer, [1985](#); Schadé, [1919](#)). Pertimbangan politik dan ekonomi tersebut menyebabkan pemerintah Belanda untuk sementara lebih memusatkan perhatian pada wilayah barat Sumatera daripada melakukan penguasaan langsung atas Sumatera Timur.

Perubahan arah ekspansi kolonial mulai terlihat ketika Kesultanan Siak menghadapi ketidakstabilan politik akibat konflik internal dan keterlibatan Adam Wilson, seorang pedagang Inggris. Sultan Ismail sebelumnya meminta bantuan Wilson untuk menghentikan pemberontakan, tetapi tuntutan imbalan yang dianggap terlalu tinggi justru menimbulkan persoalan baru. Sultan Ismail kemudian meminta bantuan pemerintah kolonial Belanda untuk mengusir Wilson dengan menerima perlindungan Belanda atas Siak dan wilayah yang diklaim sebagai daerah taklukannya (Basarshah, [2006](#)). Kesepakatan tersebut memperoleh dasar hukum melalui Traktat Siak pada 1858 yang menjadi instrumen penting bagi perluasan pengaruh Belanda di Sumatera Timur. Melalui

perjanjian tersebut, pemerintah kolonial menggunakan klaim kekuasaan Siak atas Deli, Serdang, Langkat, dan Asahan sebagai dasar untuk memperluas otoritas politiknya.

Traktat Siak yang ditandatangani pada 1 Februari 1858 menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura beserta wilayah yang diklaim sebagai daerah taklukannya berada di bawah supremasi Belanda. Perjanjian tersebut melibatkan Sultan Siak dan kalangan bangsawan serta memuat sejumlah wilayah yang ditempatkan dalam lingkup kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Wilayah tersebut mencakup Siak, Kampar, Tanah Putih, Mandau, Pekanbaru, Tapong Kiri, dan Tapong Kanan, serta kawasan di sebelah barat laut Siak. Daftar wilayah lainnya meliputi Tanah Poetih, Banko, Koeba, Bilah, Paneh, Kwalu, Assahan, Batu Bara, Bedageh, Padang, Serdang, Pertjut, Pebangunan, Deli, Langkat, Temiang, serta Pulau Bengkalis yang mencakup Padang, Pantjor, Rantau, dan Roepat (Schadé, 1919). Pencantuman wilayah-wilayah tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah kolonial memanfaatkan klaim politik Kesultanan Siak sebagai landasan hukum untuk memperluas pengaruhnya, meskipun pengakuan dari penguasa lokal belum sepenuhnya diperoleh.

Traktat Siak belum secara langsung menghasilkan penguasaan efektif atas negeri-negeri Sumatera Timur hingga Residen Riau, Elisa Netscher, melakukan serangkaian ekspedisi untuk menunjukkan kehadiran pemerintah kolonial (Basarshah, 2006). Netscher berupaya membujuk para penguasa lokal agar mengakui kedudukan Siak dan menerima otoritas Hindia Belanda. Bersama Jacobus Nienhuys, Netscher kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan kolonisasi Sumatera Timur melalui peran politik dan administratifnya. Di tengah kehati-hatian pemerintah kolonial, Netscher berusaha meyakinkan pejabat di Batavia, pemerintah Belanda, dan kalangan berpengaruh di *Straits Settlements* bahwa penguasaan Sumatera Timur dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi. Netscher melaksanakan ekspedisi menggunakan kapal perang *Haarlemmermeer* pada Agustus 1862 dan Februari 1863 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengaruh kolonial di kawasan tersebut (Schadé, 1919).

Para penguasa lokal memberikan tanggapan yang berbeda terhadap ekspedisi dan tuntutan politik Netscher. Sebagian penguasa, terutama di Asahan dan Serdang, menolak mengakui kekuasaan Siak maupun tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda karena masih menempatkan Aceh sebagai kekuatan politik yang berpengaruh. Penguasa Deli dan Langkat menolak klaim kekuasaan Siak, tetapi bersedia menerima hubungan politik dengan pemerintah Hindia Belanda. Langkat bahkan meminta perlindungan Netscher untuk memulihkan ketertiban wilayahnya, sedangkan Deli menyatakan kesediaan untuk mengakui otoritas kolonial (Basarshah, 2006). Perbedaan sikap tersebut memperlihatkan bahwa proses perluasan kekuasaan Belanda tidak selalu berlangsung melalui pemaksaan militer, tetapi juga melibatkan negosiasi dan kepentingan politik masing-masing kerajaan.

Asahan dan Serdang tetap mengharapkan dukungan Aceh dan Inggris untuk menghadapi tekanan politik pemerintah kolonial Belanda. Aceh menunjukkan kehati-hatian dalam menghadapi kemungkinan konflik terbuka dengan Belanda, sedangkan pemerintah Inggris tidak memiliki kepentingan politik yang cukup besar untuk memberikan dukungan langsung kepada kedua kerajaan tersebut. Jaminan terhadap perdagangan yang lebih liberal di Sumatera Timur turut mengurangi dorongan Inggris untuk terlibat dalam persaingan politik setempat (Reid, 2007). Situasi tersebut mempersempit pilihan politik penguasa lokal yang berusaha mempertahankan kedudukannya di tengah perluasan pengaruh kolonial. Perkembangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekspansi Belanda juga berkaitan dengan perubahan keseimbangan kekuatan regional di Selat Malaka.

Netscher memandang penegakan ketertiban kolonial sebagai prasyarat untuk meningkatkan kegiatan perdagangan dan memperluas industri perkebunan di Sumatera Timur. Ia menghubungkan kemunduran pertanian dan perdagangan Deli dengan konflik berkepanjangan antar kepala suku yang dianggap menghambat produktivitas ekonomi. Dalam pengamatannya, jumlah ekspor lada pada 1862

hanya mencapai sekitar 8.000 pikul, meskipun kegiatan pertanian pala dan kelapa menunjukkan perkembangan. Netscher tetap menilai bahwa kondisi tanah dan penduduk Sumatera Timur memiliki potensi besar bagi pertanian apabila pemerintah kolonial mampu menciptakan stabilitas politik. Penilaian tersebut memperlihatkan pandangan kolonial yang menempatkan campur tangan pemerintah Eropa sebagai faktor utama untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi wilayah tersebut (Netscher, [1861](#)).

Pandangan Netscher juga memperlihatkan bias kolonial ketika ia menghubungkan konflik di Sumatera Timur dengan keterbatasan campur tangan pemerintah Belanda. Ia menilai bahwa hubungan perdagangan Inggris lebih banyak menjadikan kawasan tersebut sebagai pasar senjata tajam dan bubuk mesiu yang dianggap memperburuk konflik antarkelompok. Penjelasan tersebut mengabaikan kompleksitas hubungan politik lokal dan cenderung menempatkan pemerintah kolonial sebagai pihak yang mampu menghadirkan ketertiban. Netscher menggunakan gambaran mengenai kekacauan dan potensi ekonomi wilayah sebagai dasar untuk membenarkan perlunya penguatan otoritas Belanda. Narasi tersebut menunjukkan bagaimana pengetahuan kolonial tidak hanya berfungsi menggambarkan keadaan Sumatera Timur, tetapi juga membangun legitimasi bagi perluasan kekuasaan politik dan ekonomi (Netscher, [1861](#)).

Netscher melihat Sumatera Timur sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi besar, meskipun pengetahuan masyarakat Eropa mengenai kondisi alam dan sumber dayanya masih terbatas. Sebagian kalangan Eropa menggambarkan wilayah tersebut sebagai kawasan primitif yang tertutup hutan tropis dan belum berkembang secara ekonomi. Laporan perjalanan Anderson yang diterbitkan pada 1826 menjadi salah satu sumber utama pengetahuan Eropa mengenai Sumatera Timur pada masa itu. Keterbatasan informasi tersebut mendorong Netscher mengirimkan permohonan kepada pemerintah di Batavia untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap potensi sumber daya alam wilayah tersebut (Broersma, [1919](#)). Permohonan tersebut memperoleh tanggapan dari perkumpulan ilmu pengetahuan kolonial *Natuurkundig Genotschap en Wetenschappen* di Batavia yang kemudian melibatkan seorang naturalis bernama J. S. G. Gramberg dalam ekspedisi ilmiah ke Sumatera Timur.

Gramberg mengumpulkan berbagai hasil bumi Sumatera Timur selama ekspedisinya dan membawa sampel tersebut ke Batavia untuk diperkenalkan kepada kalangan pengusaha dan lembaga yang bergerak dalam bidang pertanian, industri, serta ilmu pengetahuan alam. Kegiatan tersebut bertujuan menarik minat pengusaha Belanda untuk mengembangkan usaha pertanian di Sumatera Timur sebagaimana yang telah berlangsung di Jawa. Upaya tersebut belum memperoleh tanggapan yang memuaskan karena para pengusaha masih memiliki pengetahuan terbatas mengenai kondisi wilayah dan peluang investasinya. Sebagian pengusaha di Batavia menggambarkan Sumatera Timur sebagai kawasan liar (*wilderness*) yang dihuni masyarakat yang mereka anggap tidak beradab (*uncivilized*). Pandangan tersebut memperlihatkan bagaimana konstruksi pengetahuan kolonial mengenai lingkungan dan masyarakat lokal turut memengaruhi penilaian terhadap risiko investasi di wilayah perbatasan ekspansi (*frontier*) (Gramberg, [1864](#)).

Pada periode yang sama dengan ekspedisi Gramberg, Said Abdullah Ibnu Umar Bilsagih melakukan perjalanan ke Jawa Timur untuk memperkenalkan potensi tembakau Deli kepada para pengusaha perkebunan. Ia berupaya meyakinkan kalangan pengusaha bahwa karakteristik tembakau Deli memiliki kualitas yang sesuai untuk dikembangkan sebagai komoditas perkebunan. Dalam perjalanan tersebut, Abdullah Bilsagih bertemu dengan Jacobus Nienhuys di sebuah rumah lelang di Surabaya ketika Nienhuys sedang mencari lahan baru untuk pengembangan perkebunan tembakau perusahaan Van de Arend di Besuki. Keterbatasan lahan yang tersedia di Besuki membuat tawaran pembukaan perkebunan di Deli semakin menarik bagi Nienhuys. Abdullah Bilsagih menyampaikan bahwa Deli berpotensi menghasilkan sekitar 30.000 pikul tembakau setiap tahun, sementara jumlah

penduduk yang relatif sedikit dan luasnya lahan yang belum dibuka memberikan peluang bagi ekspansi perkebunan pada masa berikutnya (Broersma, [1919](#)).

Kedatangan Jacobus Nienhuys di Deli pada Juni 1863 menandai tahap penting dalam perkembangan kolonisasi Sumatera Timur. Kehadirannya membuka jalan bagi pertumbuhan industri perkebunan tembakau yang kemudian menjadi salah satu penggerak utama ekspansi ekonomi kolonial. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kolonisasi Sumatera Timur tidak hanya melibatkan penguasaan politik, tetapi juga perubahan sistem produksi dan pemanfaatan lingkungan. Para pengusaha perkebunan membawa cara pengelolaan lahan yang berbeda dengan praktik ekonomi masyarakat setempat melalui pembukaan hutan secara luas untuk kepentingan tanaman komersial. Perubahan ini berkaitan dengan pandangan kolonial yang menganggap hutan belantara sebagai simbol keterbelakangan dan memandang pembukaan lahan sebagai bagian dari proses membangun peradaban.

Para pengusaha perkebunan tidak hanya menebang hutan untuk membuka lahan tembakau, tetapi juga membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi komoditas. Mereka membuka jalan yang menghubungkan kawasan perkebunan dengan wilayah sekitar dan pedalaman, mendirikan bangunan berbahan kayu, serta mengembangkan permukiman di sepanjang sungai dan kawasan produksi. Pembangunan tersebut mencerminkan upaya penyesuaian lingkungan alam agar sesuai dengan kebutuhan industri perkebunan dan kehidupan masyarakat kolonial. Dalam pandangan pengusaha, perubahan bentang alam tersebut merupakan bagian dari usaha menjadikan Sumatera Timur lebih layak huni dan produktif secara ekonomi. Perluasan perkebunan pada akhirnya mengubah struktur ekologis wilayah secara nyata, terutama melalui berkurangnya kawasan hutan akibat pembukaan lahan secara terus-menerus (Itawan, [2020](#)).

Kehadiran Nienhuys di Deli juga mempercepat kedatangan pengusaha perkebunan dan pekerja migran ke negeri-negeri di sebelah barat daya Siak. Perkembangan tersebut sejalan dengan harapan Netscher yang menginginkan agar perluasan kekuasaan Belanda dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pemerintah kolonial. Ekspedisi Gramberg sebelumnya merupakan bagian dari upaya memperkenalkan potensi sumber daya alam Sumatera Timur kepada kalangan investor. Pemerintah kolonial bahkan pernah melakukan percobaan penanaman kapas di sekitar Siak setelah ekspedisi tersebut, meskipun hasilnya tidak menunjukkan keberhasilan yang berarti (Broersma, [1919](#)). Perkembangan Deli memperlihatkan perbedaan penting karena pengusaha swasta asing, bukan pemerintah kolonial, menjadi penggerak utama pertumbuhan industri perkebunan di wilayah tersebut.

Pertumbuhan industri perkebunan yang dirintis Nienhuys membutuhkan penyesuaian lingkungan alam sekaligus perubahan kondisi sosial dan politik Sumatera Timur. Para pengusaha perkebunan berperan besar dalam pembukaan hutan serta pembangunan jalan dan jaringan kereta api untuk mendukung kegiatan produksi ("De Deliaan Gaan Feestvieren," [1938](#)). Pemerintah kolonial mengambil peran dalam menciptakan kondisi politik dan administratif yang dianggap mendukung keamanan investasi dan keberlangsungan usaha perkebunan. Ketika Nienhuys tiba di Deli, proses penundukan negeri-negeri sekitarnya masih berlangsung, sementara laporan pengusaha perkebunan sering menggambarkan konflik antarkelompok dan perampokan sebagai ancaman terhadap kegiatan ekonomi. Pemerintah kolonial kemudian memperkuat kebijakan pasifikasi terhadap wilayah di sekitar Deli dan Langkat, terutama Serdang dan Asahan, untuk menciptakan stabilitas politik yang mendukung perkembangan industri perkebunan (Basarshah, [2006](#)).

Perkembangan administrasi kolonial di Sumatera Timur memiliki hubungan erat dengan kebutuhan industri perkebunan yang semakin meluas. Pada tahap awal ekspansi, pemerintah kolonial menempatkan urusan administratif wilayah ini dalam lingkup Keresidenan Riau dengan

memanfaatkan hubungan politik melalui Kesultanan Siak. Pertumbuhan perkebunan yang dirintis Nienhuys mendorong pembentukan Keresidenan Sumatera Timur pada 1873 dengan Bengkalis sebagai pusat pemerintahan. Perubahan tersebut berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan pengaturan konsesi perkebunan, perdagangan, navigasi, serta hubungan administratif antara pengusaha Eropa dan pemerintah lokal. Pesatnya perkembangan ekonomi Deli kemudian mendorong pemindahan ibu kota keresidenan dari Bengkalis ke Medan pada 1887, sebelum pemerintah kolonial meningkatkan status Sumatera Timur menjadi *Gouvernement* pada 1915 dengan Van der Plas sebagai gubernur pertamanya.

Pemerintah kolonial membagi wilayah administratif Sumatera Timur ke dalam lima *afdeling* untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan wilayah. *Afdeling* Deli dan Serdang berada di bawah seorang asisten residen dengan Kota Medan sebagai pusat utama serta mencakup empat wilayah administratif, yaitu *Beneden Deli* yang meliputi Kesultanan Deli, *Boven Deli* yang mencakup wilayah Batak dan Kesultanan Deli, Serdang yang meliputi Kesultanan Serdang, serta Padang dan Bedagei. *Afdeling* Langkat berpusat di Tanjung Pura dan mencakup *Boven Langkat* serta *Beneden Langkat*, dengan wilayah *Beneden Langkat* berada dalam pemerintahan langsung Kesultanan Langkat. *Afdeling* Asahan mencakup Asahan, Batu Bara, dan Labuhan Batu, sedangkan *Afdeling* Bengkalis meliputi Bengkalis, Siak, Bagan Si Api-Api, Rokan, dan Kampar Kiri. *Afdeling* Simalungun dan Karolanden berpusat di Pematang Siantar dengan wilayah administratif Siantar dan Karolanden (Tijdschrift Voor Economische Geographie, [1918](#)).

Pemerintah Hindia Belanda mengendalikan sebagian besar urusan pemerintahan kolonial di Sumatera Timur, tetapi tetap mempertahankan kedudukan kerajaan-kerajaan lokal melalui sistem pemerintahan sendiri atau *zelfbestuur*. Melalui sistem tersebut, para penguasa lokal menjalankan urusan pemerintahan dan mengatur masyarakat dalam wilayah kekuasaan masing-masing dengan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial juga membiarkan kewenangan formal atas akses sumber daya alam berada pada pemerintahan lokal, meskipun pelaksanaannya mengikuti ketentuan dan kepentingan administrasi kolonial. Penguasa lokal tetap mengeluarkan konsesi pertanian, kehutanan, dan pertambangan dengan persetujuan asisten residen yang mendampingi penyelenggaraan *zelfbestuur* (*De Sumatra Post*, [1915](#); *De Sumatra Post*, [1938](#)). Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial memanfaatkan struktur kekuasaan lokal sebagai bagian dari mekanisme administratif untuk mendukung perluasan investasi dan penguasaan sumber daya alam di Sumatera Timur.

SIMPULAN

Kolonisasi Sumatera Timur pada paruh akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 merupakan proses multidimensional yang melibatkan ekspansi kekuasaan politik, penetrasi kapital swasta, produksi pengetahuan kolonial, dan transformasi ekologis. Investasi perkebunan tembakau sejak 1860-an mempercepat kolonisasi melalui dukungan pemerintah kolonial, sementara ekspedisi ilmiah dan laporan administratif membentuk representasi Sumatera Timur sebagai wilayah yang dianggap “kosong” dan “liar” untuk melegitimasi penguasaan sumber daya alam. Pembukaan hutan, pengeringan rawa, dan pembangunan infrastruktur perkebunan kemudian mengubah bentang alam menjadi kawasan produksi monokultur yang terintegrasi dengan pasar global. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pembacaan produksi pengetahuan kolonial dan transformasi ekologis sebagai instrumen ekspansi kekuasaan dan kapitalisme, bukan sekadar dampak perkembangan perkebunan sebagaimana lebih banyak ditekankan dalam kajian terdahulu.

Kajian sejarah kolonialisme perlu memperluas analisis terhadap hubungan antara kekuasaan politik, kapitalisme, produksi pengetahuan, dan perubahan lingkungan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena sebagian besar sumber yang digunakan berasal dari laporan dan dokumen

kolonial yang cenderung merepresentasikan kepentingan pemerintah serta pengusaha Eropa. Keterbatasan tersebut belum memungkinkan penelitian menggambarkan secara menyeluruh pengalaman masyarakat lokal dan dampak ekologis jangka panjang. Penelitian selanjutnya perlu memanfaatkan sumber lokal, arsip pertanahan, dan data lingkungan untuk memperkuat interpretasi sejarah kolonisasi Sumatera Timur.

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengintegrasikan pendekatan sejarah lingkungan dan sejarah kapitalisme dalam menganalisis ekspansi kolonial di Sumatera Timur. Kajian komparatif dengan kawasan perkebunan kolonial lainnya diperlukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mekanisme penguasaan wilayah serta transformasi ekologis. Pemanfaatan peta historis, data spasial, dan arsip lokal dapat memperjelas perubahan penggunaan lahan serta hubungan antara pemerintah kolonial, pengusaha swasta, dan masyarakat setempat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai warisan kolonial yang masih memengaruhi struktur agraria, perekonomian, dan kondisi lingkungan Sumatera Timur.

REFERENSI

- Anderson, J. (1971). *Mission to the East Coast of Sumatra, in 1823*. Oxford University Press.
- Ayu, N. D. (2021). Dinamika Pertumbuhan dan Perkembangan Kesehatan Masyarakat di Sumatera Timur, 1882-1942. *Local History & Heritage*, 1(1), 21-26. <https://doi.org/10.57251/lhh.viii.24>
- Basarshah, T. L. S. (2006). *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Yayasan Kesultanan Serdang.
- Blink, H. (1926). *Opkomst en Ontwikkeling van Sumatra als Economisch-Geographisch Gebied: Met Schetskaartjes*. Mouton.
- Breman, J. (1997). *Menjinakkan Sang Kuli. Politik Kolonial Tuan Kebun dan Kuli di Sumatra Timur pada Awal Abad Ke-20*. Graffiti Pres.
- Broersma, R. (1919). *Oostkust van Sumatra: De Ontluiking van Deli* (Vol. 1). Javasche Boekhandel.
- Colombijn, F. (1998). The Ecological Sustainability of Frontier Societies in Eastern Sumatra. In *Paper Landscapes* (pp. 309-339). Brill.
- De Buitenzettingen Oostkust van Sumatra*. (1918).
- De Deliaan gaan feestvieren*. (1938). *De Telegraaf*.
- De Sumatra Post*. (1915).
- De Sumatra Post*. (1938).
- Een en Ander over Deli. (1904). *Indische Mercur*.
- Gramberg, J. S. G. (1864). *Reis naar Siak*.
- Ikhsan, E. (2021). *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum*. Pustaka Obor Indonesia.
- Itawan, D. (2020). *Eksplorasi Kolonial dan Perubahan Lingkungan di Sumatera Timur, 1860an-1930an*. Universitas Gadjah Mada.
- Itawan, D. (2022). Perkembangan Aspek Ilmu Pengetahuan dalam Industri Perkebunan di Sumatra Timur 1863-1942. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 12(3), 233-245. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v12i3.1068>
- Lindblad, J. T. (1989). Economic Aspects of the Dutch Expansion in Indonesia, 1870-1914. *Modern Asian Studies*, 23(1), 1-24. <https://doi.org/10.1017/S0026749X00011392>
- Locher-Scholten, E. (1994). Dutch Expansion in the Indonesian Archipelago Around 1900 and the Imperialism Debate. *Journal of Southeast Asian Studies*, 25(1), 91-111. <https://doi.org/10.1017/S002246340000669X>
- Milner, A. C., McKinnon, E. E., & Sinar, T. L. (1978). A Note on Aru and Kota Cina. *Indonesia*, (26), 1-42.
- Netscher, E. (1861). *Togtjes in Het Gebied van Riouw en Onderhoorigheden*.
- Pelzer, K. J. (1985). *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur 1863-1947*. Sinar Harapan.

- Perret, D. (1994). De La Forêt Primaire Aux Plantations Coloniales: Les Deux Ruptures Politiques et Socio-Economiques de la Côte Est De Sumatra-Nord. *Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient*, 81, 153–179.
- Ramadhan, M. F., & Achiriah, A. (2026). The Role of AVROS in the Recruitment and Distribution of Plantation Labor in East Sumatra during the Colonial Period, 1910–1942. *Local History & Heritage*, 6(1), 43–52. <https://doi.org/10.57251/lhh.v6i1.2022>
- Reid, A. (2007). *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*. Yayasan Pustaka Obor.
- Schadé, W. H. M. (1919). *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust*. B. van Mantgem.
- Stoler, A. L. (2005). *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra 1870-1979*. Karsa Lingkar untuk Pembaruan Pedesaan dan Agraria.
- Tarling, N. (1958). The Relationship between British Policies and the Extent of Dutch Power in the Malay Archipelago 1784–1871. *Australian Journal of Politics & History*, 4(2), 179–192. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8497.1958.tb00397.x>
- Thee, K. W. (1969). *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatra, 1863-1942*. *Tijdschrift Voor Economische Geographie*. (1918).
- Utari, M. T. (2023). Roman Medan: Analisis Potret Sosial dalam Karya Sastra Masa Revolusi Indonesia di Sumatera Timur, 1945-1949. *Local History & Heritage*, 3(2), 46–55. <https://doi.org/10.57251/lhh.v3i2.1057>
- Van Bemmelen, R. W. (1949). *The Geology of Indonesia Vol. I A*. Gouvernement Printing Office.
- Van Zon, P. (1916). *Bijdragen tot de Kennis der Boschgesteldheid van Residemtie van Oostkust van Sumatra*. *Tectona*, 9(5).